BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Seamless Transport Through Integration

2024

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
TATAN RUSTANDI, A.TD., M.Sc.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Monitoring Capaian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan II Tahun 2024 ini bisa diselesaikan pada waktunya.

Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020, maka disusunlah Laporan Monitoring Capaian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan II Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban yang memuat gambaran keberhasilan kinerja, langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, dan kendala dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya *good governance* di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kinerja tersebut diukur berdasarkan Sasaran Program sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Meskipun disadari bahwa dalam laporan ini masih dijumpai sejumlah kekurangan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan dan sebagai umpan balik bagi jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, Juli 2024

Plt. KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JABODETABEK

TATAN RUSTANDI, A.TD., M.Sc.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660823 198903 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 5
1. LATAR BELAKANG 5
2. TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA 7
2.1. Tugas 7
2.2. Fungsi 7
3. STRUKTUR ORGANISASI 8
3.1. Sekretariat 9
3.2. Direktorat Prasarana 9
3.3. Direktorat Lalu Lintas 9
3.4. Direktorat Angkutan 9
4. PERJANJIAN KINERJA 9
BAB II DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 13
1. Capaian Kinerja 13
1.1. IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek 14
1.2. IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek 23
1.3. IKP2.2 On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek 28
1.4. IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek 32
1.5. IKP5 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ 36
2. Alokasi Anggaran Tahun 2024 40
3. Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2024 40
4. Efisiensi Anggaran Triwulan II Tahun 2024 41
BAB III PENUTUP 43

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ Tahun 2024 11

Tabel II. 1 Realisasi Capaian Kinerja BPTJ Triwulan II Tahun 2024 13
Tabel II. 2 Panjang Trayek Angkot 15
Tabel II. 3 Panjang Trayek Bus 15
Tabel II. 4 Total Panjang Trayek..... 16
Tabel II. 5 Panjang Jalan di Jabodetabek..... 16
Tabel II. 3 Panjang Rel Kereta Api Perkotaan 17
Tabel II. 4 Luas Wilayah Jabodetabek..... 18
Tabel II. 5 Simpul Terintegrasi di Jabodetabek..... 19
Tabel II. 6 Unsur Pelayanan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat 24
Tabel II. 7 Penilaian Unsur Pelayanan..... 25
Tabel II. 8 On Time Performance Bus Perkotaan 30
Tabel II. 9 On Time Performance Kereta Api Perkotaan..... 30
Tabel II. 10 Kejadian Kecelakaan Tahun 2024 32
Tabel II. 12 Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2024..... 40
Tabel II. 13 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKP 40
Tabel II. 14 Efisiensi Anggaran..... 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 8

Gambar II.1 Kurva S Realisasi Anggaran..... 40

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pentingnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terutama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, menjadi dasar utama penyusunan laporan monitoring capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan demi mewujudkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan II Tahun 2024 adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2024 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan oleh BPTJ dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Untuk melaporkan

capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis, perlu dilakukan pengukuran capaian kinerja *(performance result)* tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan rencana kerja *(performance plan)* yang telah disesuaikan dengan DIPA TA 2024 berikut revisinya, sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan BPTJ. Analisis atas capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja *(performance gap)* bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Penyusunan laporan ini melibatkan identifikasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Dengan merinci tujuan-tujuan melalui perumusan indikator kinerja, laporan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana pencapaian tujuan dapat terwujud..

Dalam konteks pelayanan transportasi, wilayah Jabodetabek memiliki dinamika dan tantangan tersendiri. Laporan ini akan menggali bagaimana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek merespons kebutuhan masyarakat akan transportasi..

Dalam mencapai sasaran keberlanjutan, laporan ini juga akan menyoroti upaya-upaya yang telah dilakukan Pentingnya laporan ini tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan internal Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Laporan ini juga memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai upaya yang telah dilakukan oleh badan ini dalam menyediakan layanan transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan menyusun "Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024," Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek memberikan contoh nyata komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi dan pertanggungjawaban yang ditunjukkan melalui laporan ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan landasan untuk perbaikan terus-menerus dalam menghadapi tantangan transportasi yang kompleks di wilayah Jabodetabek

2. TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Tugas dan fungsi BPTJ antara lain:

2.1. Tugas

BPTJ mempunyai tugas mengembangkan, mengelola dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

2.2. Fungsi

Fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam pengembangan transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi adalah:

a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan;
b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran;
c. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen;
d. Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi;
e. Penyiapan bahan usulan regulasi dan kebijakan;
f. Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal;
g. Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
h. Pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (*feeder service*);
i. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana;
j. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran RITJ yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya; dan
k. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai dengan Pasal 521 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, terdiri dari Sekretariat, Direktorat Prasarana, Direktorat Lalu Lintas, dan Direktorat Angkutan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

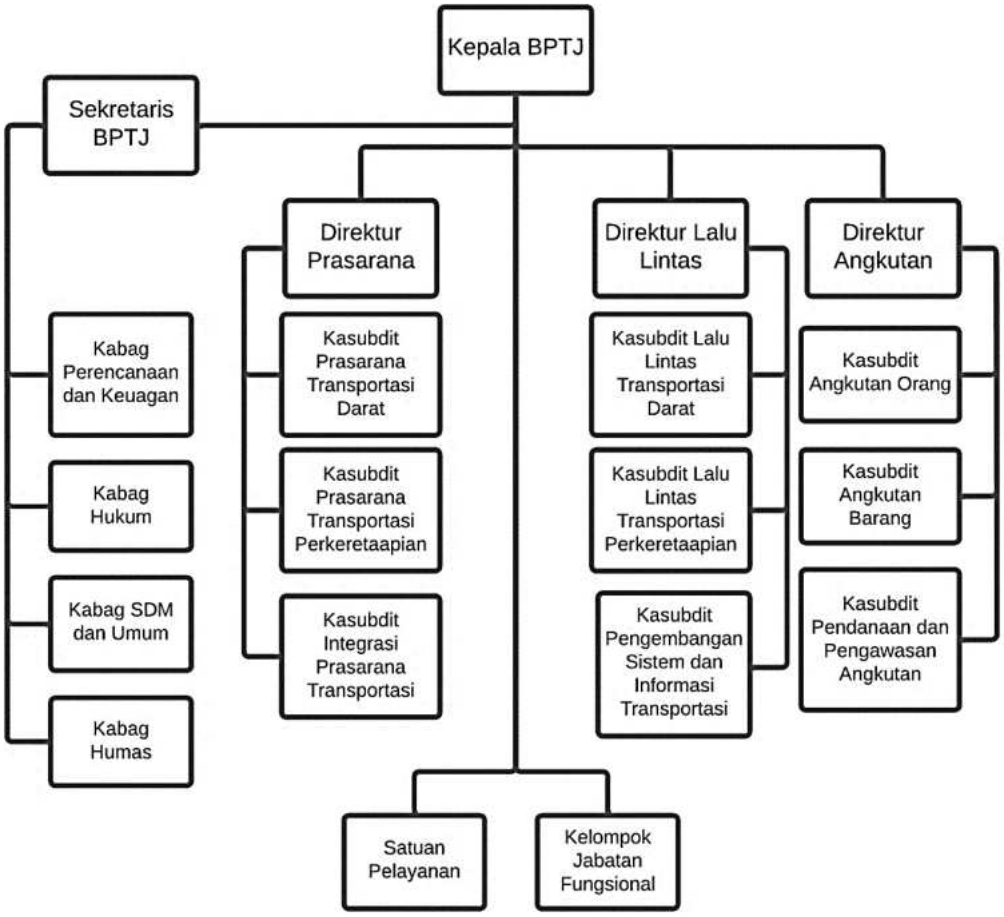

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

3.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ.

3.2. Direktorat Prasarana

Direktorat Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat, perkeretaapian, serta integrasi prasarana transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

3.3. Direktorat Lalu Lintas

Direktorat Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat, lalu lintas transportasi perkeretaapian, serta pengembangan sistem dan informasi transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

3.4. Direktorat Angkutan

Direktorat Angkutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang, serta pengawasan angkutan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

4. PERJANJIAN KINERJA

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada tahun 2024 telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut

telah ditandatangani oleh Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon IIdengan Eselon I, serta ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dengan Menteri Perhubungan.

Sasaran Program (SP) BPTJ merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome* dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Penyusunan Sasaran Program dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan, serta capaian dan permasalahan yang dihadapi oleh BPTJ pada periode sebelumnya. Sasaran Program BPTJ terdiri dari 4 (empat) sasaran program:

1. Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek;
2. Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek;
3. Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek;
4. Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan PengelolaTransportasi Jabodetabek.

Selanjutnya empat Sasaran Program tersebut dijabarkan menjadi 5 (lima) Indikator Kinerja Program (IKP). Indikator Kinerja Utama BPTJ adalah sebagai berikut:

1. Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek;
3. OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek;
4. Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan;
5. Indeks Reformasi Birokrasi BPTJ.

Adapun penjabaran dari perspektif sasaran BPTJ dituangkan dalam indikatorkinerja dan targetnya sebagai berikut:

1. Sasaran Program Pertama (SP1) yang akan dicapai adalah terwujudnya konektivitas transportasi Jabodetabek, dengan Indikator Kinerja Program (IKP1) yaitu Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek.
2. Sasaran Program Kedua (SP2) yang akan dicapai adalah terwujudnya

kinerja layanan transportasi Jabodetabek, dengan Indikator Kinerja Programsebagai berikut:

a. IKP 2.1: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan transportasi perkotaan Jabodetabek.

b. IKP 2.2: On Time Performance (OTP) layanan transportasi perkotaan Jabodetabek.

3. Sasaran Program Ketiga (SP3) yang akan dicapai adalah terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi Jabodetabek, dengan Indikator Kinerja Program (IKP3) yaitu Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan.

4. Sasaran Program Keempat (SP4) yang akan dicapai adalah tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, dengan Indikator Kinerja Program (IKP5) yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Korelasi antara Sasaran Strategis Kementerian, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program serta satuan dan target diuraikan dalam tabel I.1.

Tabel I.1 Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ Tahun 2024

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
SS1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	**SP1** Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	**IKP1** Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45
SS2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	**SP2** Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	**IKP2.1** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94
		IKP2.2 OTP Layanan Transportasi	%	88

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
		Perkotaan Jabodetabek		
SS3 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	**SP3** Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	**IKP3** Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek	%	100
SS4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	**SP4** Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	**IKP5** Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62

Sumber: Perjanjian Kinerja BPTJ Tahun 2024

BAB II
DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan sasaran program BPTJ. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran program yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja BPTJ Tahun 2024 dapat tercapai.

Berdasarkan penetapan target pada setiap Indikator Kinerja Program (IKP) BPTJ, berikut adalah pencapaian Sasaran Program (SP) BPTJ pada Triwulan II Tahun 2024:

Tabel II. 1 Realisasi Capaian Kinerja BPTJ Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Target Tw II 2024	Capaian Tw II 2024	% Capaian Tw II
SP1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	**IKP1** Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45	0,42	0,458	108,79%
SP2 Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	**IKP2.1** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94	93,4	93,97	100,61%
	IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	88	82	-	-

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Target Tw II 2024	Capaian Tw II 2024	% Capaian Tw II
SP3 Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	**IKP3** Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek	%	100	95	-	-
SP4 Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	**IKP5** Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62	56,25	56,25	100%

1.1. IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek

Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur transportasi perkotaan memegang peran krusial dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi suatu kawasan. Jabodetabek, sebagai salah satu kawasan metropolitan terpadat di Indonesia, menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga konektivitas transportasinya. Oleh karena itu, Analisis Pencapaian Kinerja Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek menjadi suatu kajian penting untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem transportasi.

Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan adalah alat ukur holistik yang mencakup sejumlah faktor kritis dalam konektivitas. Konektivitas transportasi perkotaan di Jabodetabek diwujudkan dengan tiga unsur pembentuk yaitu konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis jalan, konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel, dan persentase simpul transportasi utama yang terintegrasi. Terwujudnya Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diukur melalui IKP 1 ini dengan rumus berikut:

$$IKP1 = (30\% \times RKAU_{Jalan}) + (30\% \times RKAU_{KA}) + (40\% \times RST_{Utama})$$

Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan

Konektivitas angkutan umum berbasis jalan mencerminkan cakupan pelayanan angkutan umum perkotaan di jalan raya yang mengintegrasikan satu wilayah dengan wilayah lain. Dengan adanya layanan angkutan umum yang menghubungkan antar lokasi, masyarakat dapat berangkat menuju tempat tujuan dengan menggunakan angkutan umum sebagai pilihan utama bermobilitas. Konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis jalan diukur menggunakan rumus:

$$RKAU_{Jalan} = \frac{Panjang\ Trayek\ AU\ Berbasis\ Jalan\ di\ Jabodetabek}{Panjang\ Jalan\ di\ Jabodetabek}$$

Panjang trayek angkutan umum perkotaan terdiri dari trayek angkutan perkotaan (angkot) dan angkutan bus perkotaan. Panjang trayek angkot dan bus yaitu:

Tabel II. 2 Panjang Trayek Angkot

No.	Kota / Kab	Panjang Lintasan Trayek Angkot (Km)
1	Kota Bogor	368
2	Kabupaten Bogor	835
3	Kota Bekasi	979
4	Kabupaten Bekasi	
5	Kota Depok	466
6	Kabupaten Tangerang	883
7	Kota Tangerang	
8	Kota Tangerang Selatan	
9	Provinsi DKI Jakarta	1846
Total		**5377**

Sumber: Direktorat Angkutan BPTJ

Tabel II. 3 Panjang Trayek Bus

No.	Operator	Panjang Lintasan Trayek Bus (Km)
1	Agra Mas	380,8
2	Aja P	276
3	Big Bird	163
4	Damri	423,1
5	Daya Sentosa Utama	39

No.	Operator	Panjang Lintasan Trayek Bus (Km)
6	Hiba Utama	33,4
7	Kosub Bersama	108,3
8	Kramat Djati	82,5
9	Lorena	39
10	Mayasari Bakti	714,4
11	PPD	1411
12	Primajasa	112,6
13	Sinar Jaya	65,6
14	Trans Galaxy	4
15	Trans Kota	8
16	Trans Patriot	12
17	Transjakarta	3509,6
Total		**7382,3**

Sumber: Direktorat Angkutan BPTJ

Tabel II. 4 Total Panjang Trayek

No.	Moda Angkutan Umum	Panjang Lintasan Trayek (Km)
1	Angkot	5.377
2	Bus	7.382,3
Total		**12.759,3**

Data panjang trayek angkutan umum perkotaan adalah sepanjang 12.759,3 Km sebagaimana disajikan pada lampiran III. Sementara itu data panjang jalan di wilayah Jabodetabek berdasarkan hasil studi yang dilakukan BPTJ adalah sebagai berikut.

Tabel II. 5 Panjang Jalan di Jabodetabek

KAB/KOTA	PANJANG JALAN (KM)		
	NASIONAL	PROVINSI	KAB/KOTA
Jakarta Timur	22,0	1.496,0	-
Jakarta Barat	12,0	1.170,0	-
Jakarta Selatan	14,0	1.986,0	-
Jakarta Utara	46,1	88,5	979,8
Jakarta Pusat	10,5	90,9	564,8
Kota Bogor	29,0	10,5	758,9
Kab. Bogor	118,0	107,3	1.748,9
Kota Depok	-	-	547,64

KAB/KOTA	PANJANG JALAN (KM)		
	NASIONAL	PROVINSI	KAB/KOTA
Kota Tangerang	18,4	31,8	306,5
Kota Tangerang Selatan	9,8	51,6	384,7
Kab. Tangerang	27,7	108,3	992,6
Kota Bekasi	13,6	22,0	4.573,5
Kab. Bekasi	29,0	31,5	953,3
Total	17.355,1		

Sumber: Direktorat Angkutan BPTJ, 2021

Berdasarkan data tersebut, penghitungan rasio konektivitas angkutan umum berbasis jalan adalah:

$$RKAU_{Jalan} = \frac{12.759{,}3\ Km}{17.355{,}1\ Km} = 73{,}5\%$$

Dari perhitungan didapatkan nilai Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan sebesar 73,5.

Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel

Kereta api perkotaan merupakan moda alternatif agar pergerakan masyarakat tidak seluruhnya berfokus pada jalan raya. Kereta perkotaan seperti KRL dapat mencapai jarak yang lebih jauh dengan tarif subsidi yang relatif murah sehingga konektivitas angkutan berbasis rel menjadi unsur yang vital dalam sistem transportasi perkotaan. konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel diukur menggunakan rumus:

$$RKAU_{KA} = \frac{Panjang\ Jalan\ Rel\ KA\ Perkotaan\ yang\ Beroperasi}{Luas\ Wilayah\ Jabodetabek}$$

Data panjang rel adalah sepanjang 316,938 Km sesuai dengan data tabel berikut:

Tabel II. 6 Panjang Rel Kereta Api Perkotaan

Moda	Jalur/Rute		Panjang (Km)
KRL	1	Bogor – Jakarta Kota	54,516
	2	Citayam - Nambo	16,237
	3	Manggarai – Kampung Bandan	14,990

Moda	Jalur/Rute		Panjang (Km)
	4	Manggarai – Cikarang	39,195
	5	Kampung Bandan - Jatinegara	10,386
	6	Jakarta Kota - Tanjung Priok	7,374
	7	Duri - Tangerang	19,297
	8	Tenjo - Tanah Abang	48,151
	9	Cikarang - Kedung Gedeh	11,771
	10	Ancol - Rajawali	3,629
	11	Bogor - Cigombong	19,662
LRT	1	Cawang – Cibubur	14,890
	2	Cawang – Dukuh Atas	11,050
	3	Cawang – Bekasi Timur	18,490
	4	Pegangsaan Dua - Velodrome	5,800
MRT	1	Lebak Bulus – Bundaran HI	15,700
	2	Bundaran HI – Kota	5,800
Total			**316,938**

Sumber: Direktorat Prasarana BPTJ, 2024

Sementara itu, luas wilayah Jabodetabek adalah seluas 6.437,89 Km^2 sebagaimana dijabarkan dalam tabel:

Tabel II. 7 Luas Wilayah Jabodetabek

Wilayah	Luas (Km^2)
DKI Jakarta	664,01
Kabupaten Bogor	2710,62
Kota Bogor	118,5
Kota Depok	200,29
Kota Bekasi	206,61
Kabupaten Bekasi	1224,88
Kabupaten Tangerang	1011,86

Wilayah	Luas (Km^2)
Kota Tangerang	153,93
Kota Tangerang Selatan	147,19
Total	6437,89

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan data tersebut maka diperoleh penghitungan untuk IKK2 Rasio konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel:

$$IKK2 = \frac{316{,}938\ Km}{6.437{,}89\ Km^2} = 0{,}0492$$

Dari perhitungan didapatkan nilai Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel sebesar 0,0492.

Rasio Integrasi Simpul Utama

Integrasi dilaksanakan dalam rangka kemulusan transportasi sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Adanya integrasi membuat perpindahan moda pada saat perjalanan ke tempat tujuan menjadi lebih mudah dan nyaman. Untuk itu diperlukan adanya integrasi antar simpul transportasi perkotaan. Rasio integrasi simpul transportasi utama diukur dengan rumus:

$$RST_{Utama} = \frac{Simpul\ Utama\ dengan\ Akses\ Integrasi\ ke\ dan\ dari\ Simpul\ Perkotaan}{Jumlah\ Simpul\ Transportasi\ Utama\ di\ Jabodetabek}$$

Jumlah simpul transportasi utama yang terintegrasi adalah sejumlah 84 simpul, sementara total simpul utama di Jabodetabek adalah 151 simpul dengan detail disajikan dalam lampiran IV.

Tabel II. 8 Simpul Terintegrasi di Jabodetabek

Lokasi Simpul Transportasi	Jumlah Total Simpul	Jumlah Simpul Terintegrasi
DKI Jakarta	88	61

Lokasi Simpul Transportasi	Jumlah Total Simpul	Jumlah Simpul Terintegrasi
Bekasi Raya	16	8
Kota Depok	6	3
Bogor Raya	21	3
Tangerang Raya	20	9
Total	**151**	**84**

Sumber: Direktorat Prasarana BPTJ, 2024

Berdasarkan data tersebut, penghitungan rasio integrasi simpul transportasi utama adalah:

$$RST_{Utama} = \frac{84}{151} = 55{,}6\%$$

Dari perhitungan didapatkan nilai Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi sebesar 55,6.

IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek ditunjang oleh tiga unsur penunjang. Data capaian IKK penunjang IKP1 adalah sebagai berikut:

- Nilai RKAU Jalan sebesar 73,5
- Nilai RKAU KA sebesar 0,0492
- Nilai RST Utama sebesar 55,6

Dengan data tersebut, diperoleh penghitungan IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek:

$$IKP1 = (30\% \times 73{,}5) + (30\% \times 0{,}0492) + (40\% \times 55{,}6)$$
$$IKP1 = 0{,}458$$

Dari perhitungan didapat nilai Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek adalah sebesar 0,458. Hasil capaian dari IKP1 mencapai 108,79% dari target Triwulan II Tahun 2024 yaitu sebesar 0,421.

Analisis Pencapaian Kinerja

Selama tahun 2024, BPTJ secara aktif menjalankan serangkaian kegiatan strategis yang bertujuan untuk mendukung pencapaian dan peningkatan Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di wilayah Jabodetabek. Dengan komitmen yang kuat terhadap pengembangan infrastruktur dan pelayanan transportasi, BPTJ telah mengimplementasikan berbagai proyek yang mencakup pemeliharaan dan perluasan jaringan transportasi, peningkatan aksesibilitas transportasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi di Jabodetabek. Implementasi kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap konektivitas transportasi perkotaan, menciptakan pengalaman mobilitas yang lebih baik bagi masyarakat, dan membawa Jabodetabek menuju tingkat keterhubungan yang lebih optimal.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di wilayah Jabodetabek yaitu:

- Rapat koordinasi pengembangan trayek angkutan umum perkotaan Jabodetabek
- Penambahan trayek angkutan umum perumahan Jabodetabek Residence Connexion
- Basic Desain Perpanjangan MRT Lebak Bulus - Pondok Cabe
- Basic Desain Reaktivasi Stasiun Pondok Betung dan Fasilitas Integrasi
- Detail Engineering Design Pembangunan Stasiun Sukaresmi
- Koordinasi Perencanaan dan Harmonisasi Prasarana Transportasi Jabodetabek
- Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Integrasi Pada Simpul Transportasi di Jabodetabek
- Monitoring dan Evaluasi Kawasan TOD di Jabodetabek
- Monitoring dan Evaluasi Prasarana Transportasi Perkeretaapian
- Monitoring dan Operasional PLTS di Terminal Tipe A Jatijajar dan Pondok Cabe

- Monitoring Pengembangan Prasarana Transportasi Darat di Wilayah Jabodetabek
- Pelatihan Teknis Prasarana Perkeretaapian
- Pembangunan Fasilitas Halte Jabodetabek
- Pembangunan Jalur Sepeda pada Ruas Jalan di Kota Tangerang
- Pembangunan Jalur Sepeda pada Ruas Jalan di Kota Tangerang Selatan
- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Stasiun Pondok Rajeg
- Pendampingan Rencana Pengembangan Proyek KPBU Kawasan TOD Terminal Tipe A Poris Plawad
- Pendampingan Rencana Proyek KPBU Berbasis Rel di Wilayah Jabodetabek
- Penyusunan DED Fasilitas Integrasi pada Simpul Stasiun KRL Kampung Badan
- Penyusunan DED Pembangunan (Relokasi) Jembatan Km.48+911, Km.49+046, Km.49+300 Lintas Citayam – Nambo (Reaktivasi Stasiun Gunung Putri)
- Penyusunan Kajian UKL UPL Pembangunan Reaktivasi Stasiun Gunung Putri
- Supervisi Pembangunan Jalur Sepeda pada Ruas Jalan di Kota Tangerang
- Supervisi Pembangunan Jalur Sepeda pada Ruas Jalan di Kota Tangerang Selatan

Rencana Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya, akan dilaksanakan beberapa langkah strategis peningkatan konektivitas yaitu:

1. Melakukan koordinasi dan rapat dengan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan prasarana perkeretaapian di wilayah Jabodetabek
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan integrasi pada simpul transportasi di Jabodetabek

1.2. IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah. IKM ini didasarkan pada hasil survei kepuasan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pelayanan publik.

Hal tersebut mencerminkan pentingnya evaluasi secara sistematis terhadap kinerja instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengukur sejauh mana pelayanan publik sesuai dengan standar yang diinginkan oleh masyarakat. IKM menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik serta sebagai dasar untuk perbaikan dan inovasi.

IKM pada indikator kinerja BPTJ mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan terminal dan angkutan umum yang menjadi kewenangan BPTJ dengan memperhatikan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Rentang nilai IKM yang digunakan adalah nilai 1—100 dengan kategori mutu A s.d. D:

1. Nilai Interval 0,00-64,99 artinya kinerja unit pelayanan Tidak Baik (D);
2. Nilai Interval IKM 65,00-76,60 artinya kinerja unit pelayanan Kurang Baik (C);
3. Nilai Interval IKM 76,61-89,99 artinya kinerja unit pelayanan Baik (B);
4. Nilai Interval IKM 90-100,00 artinya kinerja unit pelayanan Sangat Baik (A).

Terdapat 8 (delapan) unsur pelayanan dalam survei kepuasan masyarakat di mana terdapat atribut pertanyaan untuk mewakili unsur-unsur tersebut. Atribut pertanyaan untuk mengukur kepuasan masyarakat dalam jasa

pelayanan angkutan umum di Jabodetabek yang akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel II. 9 Unsur Pelayanan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	Atribut Pertanyaan
1	**Informasi**	Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik
2	**Persyaratan**	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini
3	**Prosedur/Alur**	Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan
4	**Waktu Penyelesaian**	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini
5	**Tarif/Biaya**	Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan
6	**Sarana Prasarana**	Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan
7	**Respon**	Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat
8	**Konsultasi dan Pengaduan**	Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

Sumber: Sistem Aplikasi 3AS Case Survey Management

Berdasarkan delapan unsur pelayanan dan atribut pertanyaan tersebut, dilakukan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek melalui aplikasi 3AS *Case Survey Management System* yang dikelola oleh Pusat Pengembangan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan.

Pelaksanaan survei pengukuran kepuasan masyarakat atas kinerja BPTJ dilakukan di empat lokus yaitu:

1. Terminal Tipe A Jatijajar;

2. Terminal Tipe A Baranangsiang;
3. Terminal Tipe A Pondok Cabe;
4. Terminal Tipe A Poris Plawad.

Survei pengukuran kepuasan masyarakat pada Triwulan II Tahun 2024 dilaksanakan terhadap 311 responden dengan detail nilai pada lampiran V. Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data dari total 311 responden tersebut, maka diperoleh nilai rata-rata dari masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut.

Tabel II. 10 Penilaian Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Indeks
1	Informasi	94,30
2	Persyaratan	94,71
3	Prosedur/Alur	94,63
4	Waktu Penyelesaian	94,35
5	Tarif/Biaya	94,79
6	Sarana Prasarana	92,47
7	Respons	92,55
8	Konsultasi dan Pengaduan	93,93
Nilai Indeks Unit Pelayanan		**93,97**

Sumber: Sekretariat BPTJ, 2024

Kemudian berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil nilai di atas sebesar “93,97,” maka mutu pelayanan yang didapat adalah bernilai “A”
b. Sehingga berdasarkan mutu pelayanan di atas, maka kinerja unit pelayanan dapat di kategorikan “Sangat Baik.”

Adapun berdasarkan hasil survei tersebut, realisasi nilai IKM adalah 93,97 atau tercapai sebesar 100,61% dari target sebesar 93,4.

Analisis Pencapaian Kinerja

Sepanjang tahun 2024, BPTJ telah menjalankan sejumlah kegiatan yang mendukung pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan di wilayah Jabodetabek. Melalui serangkaian kegiatan strategis, BPTJ berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan transportasi, merespons kebutuhan masyarakat, dan memperkuat interaksi positif antara pengguna layanan dan sistem transportasi.

Meskipun terdapat pencapaian signifikan dalam menjalankan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan di wilayah Jabodetabek, perlu diperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi analisis singkat tercapainya target tersebut.

Faktor pertama yaitu peningkatan kualitas layanan. Keberhasilan BPTJ dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi menjadi salah satu faktor utama tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat. Inisiatif seperti perbaikan jadwal, pengoptimalan rute, perbaikan prasarana dan peningkatan kebersihan serta keamanan transportasi dapat memberikan dampak positif terhadap persepsi pengguna.

Faktor kedua adalah tantangan infrastruktur dan sarana: Meskipun terdapat pencapaian positif, perlu diakui bahwa tantangan infrastruktur, kemacetan, dan keterbatasan sarana transportasi masih dapat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan jangka panjang untuk pengembangan infrastruktur transportasi perlu terus diperhatikan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek yaitu:

- Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Jabodetabek
- Evaluasi kebutuhan angkutan pengumpang terkoneksi dengan stasiun MRT dan LRT
- Inhouse Consultant BPTJ
- Koordinasi Perencanaan dan Harmonisasi Angkutan Penumpang dan Barang Jabodetabek

- Koordinasi Teknis Pendanaan Pengawasan Pelayanan dan Keselamatan Angkutan Umum
- Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek
- Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Data Lalu Lintas Jabodetabek
- Monitoring Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Jabodetabek
- Monitoring Kinerja Kebijakan Angkutan Barang di jalan tol
- Monitoring Pemeliharaan ATCS di Wilayah Jabodetabek
- Monitoring Pengoperasian Teknologi Transportasi Jabodetabek
- Pelatihan Tata Cara Pengereman Angkutan Barang
- Pembangunan ATCS Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek
- Pemeliharaan Perangkat ATCS dan Alat counting
- Pemeliharaan Vending Machine & gate Terminal Jatijajar
- Pemeliharaan Vending Machine & gate Terminal Poris
- Pemeliharaan VMS dan Drone
- Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Berbasis Jalan dengan Skema Buy The Service di Wilayah Jabodetabek
- Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan Dengan Skema Buy The Service Di Wilayah Jabodetabek
- Pengadaan Alat Counting Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek
- Pengoperasian ATCS di Wilayah Jabodetabek
- Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Ruas dan Simpang di Jabodetabek
- Penyediaan Sistem Manajemen Operasional Angkutan Umum dengan Skema Buy The Service di Wilayah Jabodetabek
- Penyimpanan Alat Survey dan Penunjang Lalu Lintas
- Perencanaan Strategi Kolaborasi Pentahelix untuk Peningkatan Perencanaan Transportasi Perkotaan
- Perencanaan Teknis Kebutuhan Angkutan dari dan ke Bandara (JAC) di Wilayah Jabodetabek
- Perencanaan Teknis Penyusunan Tarif Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek

- Simulasi Penanganan Permasalahan Lalu Lintas Transportasi di Wilayah Jabodetabek
- Sinkronisasi Pelayanan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
- Sosialisasi Penyediaan Layanan Subsidi Angkutan Penumpang (Buy The Service) Jabodetabek
- Sosialisasi Safety Riding di Jabodetabek
- Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek (Kota Bekasi)
- Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek (Kota Bogor) Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek (Kota Tangerang) – 1
- Supervisi Pembangunan ATCS Terintegrasi Koridor Jabodetabek

Rencana Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya, akan dilaksanakan koordinasi dengan masing-masing unit pelayanan publik (satuan pelayanan terminal di lingkungan BPTJ dan perizinan angkutan orang di PTSA Gedung Cipta Kemenhub) untuk fokus mempertahankan kualitas pelayanan dan meningkatkan kinerja layanan yang nilainya masih bisa ditingkatkan

1.3. IKP2.2 On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek

On Time Performance (OTP) dalam layanan transportasi mengacu pada tingkat keberhasilan atau ketepatan waktu suatu moda transportasi dalam menjalankan jadwal atau waktu perjalanan yang telah ditetapkan. OTP menjadi indikator yang sangat penting dalam mengukur efisiensi dan kualitas layanan transportasi. Pemahaman mengenai OTP melibatkan beberapa aspek:

1. *Punctuality* (Ketepatan Waktu)

   OTP menunjukkan sejauh mana suatu layanan transportasi dapat memenuhi jadwal keberangkatan dan kedatangan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi nilai OTP, semakin baik pula kinerja ketepatan waktu layanan tersebut.

2. Kesesuaian dengan Jadwal

   Layanan transportasi yang memiliki OTP tinggi berarti kesiapan dan ketersediaan sarana transportasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemakaian sarana yang optimal dan pemeliharaan yang baik dapat mendukung OTP yang baik.

3. Pengaruh Terhadap Pelayanan

   Tingkat OTP yang tinggi memberikan dampak positif terhadap kepuasan pengguna layanan transportasi. Penumpang cenderung lebih puas ketika mereka dapat mengandalkan waktu kedatangan dan keberangkatan yang konsisten.

4. Efisiensi Operasional

   OTP juga mencerminkan efisiensi operasional penyelenggara transportasi. Proses operasional yang baik, seperti manajemen lalu lintas, perawatan rutin, dan perencanaan rute yang efektif, dapat mendukung pencapaian OTP yang tinggi.

5. Peran Teknologi

   Penerapan teknologi, seperti sistem pemantauan dan pengelolaan transportasi berbasis data, dapat membantu meningkatkan OTP dengan memberikan informasi waktu nyata dan memungkinkan pengelolaan lalu lintas yang lebih efektif.

OTP menunjukkan perbandingan antara jumlah keberangkatan dan kedatangan angkutan umum yang tepat waktu dengan jumlah total keberangkatan dan kedatangan angkutan umum. Data diperoleh dengan melakukan rekapitulasi atas waktu kedatangan dan keberangkatan bus dan kereta api.

Penghitungan OTP dilaksanakan terhadap angkutan umum bus perkotaan yang perizinannya dikeluarkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan angkutan kereta komuter Jabodetabek. Data OTP pada masing-masing moda transportasi yang diperoleh dari Perusahaan Otobus sebagai operator bus dan PT. Kereta Commuter Indonesia sebagai operator kereta api perkotaan adalah sebagai berikut

Tabel II. 11 On Time Performance Bus Perkotaan

Jumlah Perjalanan Bus	Jumlah Perjalanan Tepat Waktu	% Perjalanan Tepat Waktu
-	-	-

Sumber: Direktorat Angkutan BPTJ, 2024

Data ketepatan waktu perjalanan bus pada Triwulan II Tahun 2024 masih berada pada proses penghitungan melalui kerja sama dengan PTDI STTD sehingga belum dapat disajikan di laporan monitoring capaian kinerja triwulan kedua.

Tabel II. 12 On Time Performance Kereta Api Perkotaan

Jumlah Perjalanan KA	Jumlah Perjalanan Tepat Waktu	% Perjalanan Tepat Waktu
-	-	-

Sumber: Direktorat Lalu Lintas BPTJ, 2024

Data ketepatan waktu perjalanan kereta api perkotaan pada Triwulan II Tahun 2024 masih berada pada proses penghitungan sehingga belum dapat disajikan di laporan monitoring capaian kinerja triwulan kedua.

Berdasarkan manual penghitungan indikator kinerja utama, IKP2.2 On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek dihitung dengan rumus:

$$IKP2.2 = (50\% \times OTPAU\ Jalan) + (50\% \times OTPAU\ KA)$$

Analisis Pencapaian Kinerja

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh BPTJ guna mendukung pencapaian target kinerja On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek di tahun 2024 untuk mencerminkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan mutu layanan transportasi publik. Dalam mengejar tujuan kinerja, BPTJ memberikan penekanan pada ketepatan waktu dalam pengoperasian transportasi, yang diukur melalui indikator OTP.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek adalah:

- Koordinasi Perencanaan dan Harmonisasi Lalu Lintas Transportasi Jabodetabek
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek
- Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Orang Transportasi Jalan di Wilayah Jabodetabek
- Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Orang Transportasi Perkeretaapian
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Penataan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek
- Monitoring dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek
- Pengadaan Alat - Alat Penunjang Survei Kinerja Lalu Lintas Kereta Api Perkotaan
- Penghargaan Pramudi, Masinis Teladan dan Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek
- Penyusunan Kajian UKL UPL Pembangunan Underpass Bojonggede
- Studi Outline Business Case (OBC) Pembangunan Jalur KA Lintas Kawasan Industri Cikarang
- Studi Trase Pembangunan LRT Lintas Pondok Cina - Citayam

Pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut mencerminkan sikap proaktif BPTJ dalam menanggapi tuntutan efisiensi waktu dalam layanan transportasi perkotaan. Pencapaian target kinerja menjadi landasan evaluasi yang konkret dan memberikan dasar yang jelas untuk mengukur keberhasilan upaya yang telah dilakukan. Adanya orientasi pada efisiensi dan ketepatan waktu juga mencerminkan upaya BPTJ untuk memastikan bahwa transportasi publik menjadi pilihan yang lebih andal dan efektif bagi masyarakat.

Namun demikian, tetap ada tantangan dalam mencapai target OTP, terutama mengingat kompleksitas operasional transportasi perkotaan dan adanya gangguan atau hambatan. Dalam konteks ini, pelaksanaan berbagai

kegiatan oleh BPTJ harus dilihat sebagai langkah awal yang positif dalam perbaikan sistem transportasi.

1.4. IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek

Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi Jabodetabek diwujudkan dengan tingkat keselamatan perjalanan angkutan umum perkotaan Jabodetabek. Nilai ini membandingkan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan bus perkotaan dengan jumlah total perjalanan bus perkotaan di wilayah Jabodetabek. Data kecelakaan bus perkotaan diperoleh atas hasil koordinasi dengan perusahaan otobus sebagai operator bus perkotaan pada layanan Transjabodetabek, Jabodetabek Residence Connexion (JRC), dan Jabodetabek Airport Connexion (JAC). Tiga layanan tersebut dipilih karena perizinan layanan dikeluarkan oleh BPTJ.

Data kecelakaan angkutan bus perkotaan pada tahun 2024 disajikan pada Lampiran VIII dengan ringkasan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II. 13 Kejadian Kecelakaan Tahun 2024

No	Jenis Layanan	Jumlah Trip/Tahun	Jumlah Kejadian Kecelakaan
1.	Jabodetabek Airport Connexion (JAC)	-	-
2.	Jabodetabek Residence Connexion (JRC)	-	-
3.	TransJabodetabek	-	-
	Total	-	-

Sumber: Direktorat Angkutan BPTJ, 2024

Data kejadian kecelakaan bus perkotaan pada Triwulan II Tahun 2024 masih berada pada proses penghitungan melalui kerja sama dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) sehingga belum dapat disajikan di laporan monitoring capaian kinerja triwulan kedua.

Berdasarkan manual penghitungan indikator kinerja utama, IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek dihitung menggunakan rumus:

$$IKP3 = 100\% - \left(\frac{\sum Kecelakaan\ Bus\ Perkotaan\ \ Jabodetabek}{\sum Trip\ Bus\ Perkotaan\ Jabodetabek/10.000}\right)$$

Analisis Pencapaian Kinerja

Perusahaan Operator berperan kunci dalam menyediakan informasi yang memadai dan relevan untuk mengevaluasi tingkat keamanan transportasi umum. Kurangnya pelaporan data operasional bukan hanya mengecilkan gambaran risiko kecelakaan, tetapi juga menghambat identifikasi tren dan pola kejadian, yang penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Sebagai contoh, tanpa data yang memadai, sulit untuk menilai apakah faktor-faktor seperti kondisi jalan, cuaca, atau tingkat kepadatan lalu lintas berkontribusi pada kecelakaan.

Selain itu, keterbatasan data juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem transportasi umum. Keterbukaan dan transparansi dalam pelaporan tidak hanya merupakan kewajiban untuk memenuhi standar kinerja, tetapi juga merupakan elemen krusial untuk membangun kepercayaan publik. Kejelasan dalam menyajikan data akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang risiko yang mungkin dihadapi saat menggunakan angkutan umum.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh BPTJ untuk mewujudkan keselamatan transportasi adalah:

- Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengaturan Angkutan Barang di Wilayah Jabodetabek
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SMKPAU
- Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Sarana Angkutan di Wilayah Jabodetabek
- Pembayaran Rekening Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Jalan Nasional

- Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional di Wilayah Jabodetabek
- Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan di Ruas Jalan Nasional Wilayah Banten
- Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan di Ruas Jalan Nasional Wilayah Bekasi
- Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan di Ruas Jalan Nasional Wilayah Kabupaten Bogor
- Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung di Ruas Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek
- Pengadaan dan Pemasangan Marka BTS. KOTA SERANG - BTS. KOTA TANGERANG (Nomor Ruas 003)
- Pengadaan dan Pemasangan Marka di Jalan nasional Kota Bekasi (Nomor Ruas 001)
- Pengadaan dan Pemasangan Marka di Ruas Bts Kota Jasinga-Bts Kota Leuwiliang (Nomor Ruas 022)
- Pengadaan dan Pemasangan Marka di Ruas Jalan Bogor-Ciawi(Jalan Raya Tajur) dan Jalan Raya Ciawi (Nomor Ruas 024 & 074)
- Pengadaan dan Pemasangan Marka di Ruas Jalan Kedunghalang - Jalan Padjajaran dan Jalan Kemang-Kedunghalang (Nomor Ruas 072 & 073)
- Pengadaan dan Pemasangan Marka di Ruas Jalan Nasional Kota Depok (Nomor Ruas 099 & 100)
- Pengadaan dan Pemasangan Marka GANDARIA/BTS. DEPOK/TANGERANG - BTS. DEPOK/BGR (CIPUTAT - BGR)
- Pengadaan dan Pemasangan Marka JL. DAAN MOGOT (TANGERANG - BTS. DKI) (Nomor Ruas 004)
- Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan di Ruas Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Overhead di Ruas Jalan Nasional Wilayah Bekasi

- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Overhead di Ruas Jalan Nasional Wilayah Kabupaten Bogor
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Overhead Jalan di Ruas Jalan Nasional Wilayah Banten
- Pengadaan dan Pemasangan RPPJ di Wilayah Jabodetabek
- Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di Ruas Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek
- Pengadaan Stiker SPM Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek
- Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wilayah Jabodetabek
- Pengawasan dan Monitoring Penyelenggaraan Angkutan Wilayah Jabodetabek
- Pengawasan, Inspeksi dan Audit Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Operator Angkutan Umum
- Pengecekan Pemenuhan Persyaratan SPM Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek
- Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan di Ruas Jalan Nasional Wilayah Banten
- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan di Ruas Jalan Nasional Wilayah Bekasi
- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan di Ruas Jalan Nasional Wilayah Kabupaten Bogor
- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung di Ruas Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek
- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Marka BTS. KOTA SERANG - BTS. KOTA TANGERANG (Nomor Ruas 003)
- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Marka di Jalan nasional Kota Bekasi (Nomor Ruas 001)
- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Marka di Ruas Bts Kota Jasinga-Bts Kota Leuwiliang (Nomor Ruas 022)

- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Marka di Ruas Jalan Bogor-Ciawi(Jalan Raya Tajur) dan Jalan Raya Ciawi (Nomor Ruas 024 & 074)
- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Marka di Ruas Jalan Kedunghalang - Jalan Padjajaran dan Jalan Kemang-Kedunghalang (Nomor Ruas 072 & 073)
- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Marka di Ruas Jalan Nasional Kota Depok (Nomor Ruas 099 & 100)
- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Marka GANDARIA/BTS. DEPOK/TANGERANG - BTS. DEPOK/BGR (CIPUTAT - BGR)
- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Marka JL. DAAN MOGOT (TANGERANG - BTS. DKI) (Nomor Ruas 004)
- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan di Ruas Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek
- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Rambu Overhead di Ruas Jalan Nasional Wilayah Bekasi
- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Rambu Overhead di Ruas Jalan Nasional Wilayah Kabupaten Bogor
- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Rambu Overhead Jalan di Ruas Jalan Nasional Wilayah Banten
- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan RPPJ di Wilayah Jabodetabek
- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di Ruas Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek

1.5. IKP5 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan reformasi birokrasi di seluruh kementerian/Lembaga/pemerintah daerah (K/L/Pemda). Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dilaksanakan berdasarkan Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010 – 2025. Grand Design menjadi acuan bagi K/L/Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya

pemerintahan bersih, bertanggung jawab, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Selain itu, tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi dan menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi pemerintah;
2. Menjadikan negara yang memiliki birokrasi yang paling baik;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
5. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; dan
6. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Tingkat reformasi birokrasi sebuah unit pemerintah diukur dengan nilai reformasi birokrasi yang didapatkan dari hasil penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Selain itu, Evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait.

Berdasarkan keterangan di atas, didapati bahwa terdapat dua dimensi RB yaitu RB General dan RB Tematik. RB General merupakan potret dari lingkup Kementerian sehingga RB yang bisa dinilai dari BPTJ adalah RB Tematik yang mengukur capaian indikator dari tema terkait. Adapun indikator yang diangkat pada RB Tematik BPTJ adalah “Waktu penyelesaian proses

perizinan angkutan sewa khusus di wilayah Jabodetabek."

Untuk mengevaluasi RB Tematik tersebut, dilakukan penilaian atas empat unsur indikator sebagaimana tertera pada kertas kerja evaluasi RB yaitu:

1. Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi;
2. Ketercapaian output kegiatan pada setiap triwulan;
3. Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan);
4. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi

Pada periode Triwulan II Tahun 2024, hasil evaluasi reformasi birokrasi BPTJ telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan hasil sebagai berikut.

Penilaian	Bobot	Nilai
Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi;	25	6
Ketercapaian *output* kegiatan pada setiap triwulan;	25	12,5
Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan);	25	6,25
Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi	25	12,5
Total		56,25

Sumber: Sekretariat BPTJ, 2024

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, realisasi nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ Tahun 2024 adalah 56,25 atau tercapai sebesar 100% dari target 56,25

Permasalahan

Pada tahun 2024 terdapat perubahan pedoman penilaian reformasi birokrasi yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Masalah yang timbul dari perubahan pedoman tersebut adalah BPTJ perlu melaksanakan sosialisasi terkait penerapan reformasi birokrasi tematik sesuai aturan terbaru kepada seluruh petugas sehingga diharapkan dapat mendapatkan referensi langkah yang perlu dilakukan untuk menunjang terwujudnya reformasi birokrasi.

RB Tematik BPTJ sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 89 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 234 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020 - 2024, mengangkat isu perizinan Angkutan Sewa Khusus dengan indikator jumlah Kartu Pengawasan Elektronik yang telah dicetak. Hal ini sulit tercapai dikarenakan Kartu Pengawasan Elektronik bagi Angkutan Sewa Khusus bersifat fluktuatif dan tidak bisa mengikuti nilai tren sebelumnya. Jumlah Kartu Pengawasan Elektronik pada tahun 2021 sejumlah 3.942, Tahun 2022 sejumlah 6.259, dan Tahun 2024 sejumlah 4.478.

Rencana Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, beberapa langkah yang akan diambil oleh BPTJ adalah:

1. Melengkapi dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan serta dokumentasi kegiatan yang menunjang RB tematik
2. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang dituangkan pada rencana aksi
4. Mengubah indikator pelaksanaan RB Tematik menjadi laporan yang berisi monitoring verifikasi dokumen perizinan, jumlah penerbitan Sertifikat Standar Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan penerbitan Kartu Pengawasan Elektronik Angkutan Sewa Khusus
5. Target RB Tematik perlu disusun dengan memperhatikan cara pengukuran/penghitungannya

2. Alokasi Anggaran Tahun 2024

Alokasi anggaran BPTJ pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.330.174.011.000 (tiga ratus tiga puluh miliar seratus tujuh puluh empat juta sebelas ribu rupiah). Rincian anggaran per jenis belanja beserta realisasi per Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 14 Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	35.904.792.000	23.422.584.493	62,24%
Belanja Barang	223.365.007.000	90.271.600.060	40,41%
Belanja Modal	70.904.212.000	21.977.438.249	31,00%

Sumber: OMSPAN, 2024

3. Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2024

Anggaran BPTJ per bulan Juni tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp.132.317.298.886 atau 40,08% terhadap pagu total. Kurva S perbandingan target, realisasi, dan realisasi tahun sebelumnya disajikan sebagai berikut.

Gambar II.1 Kurva S Realisasi Anggaran

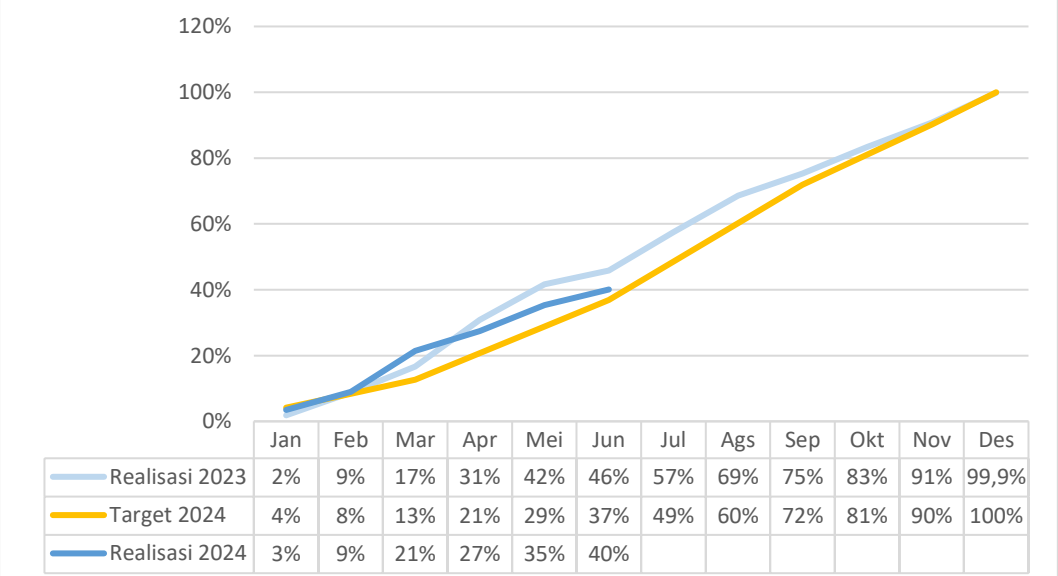

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Realisasi 2023	2%	9%	17%	31%	42%	46%	57%	69%	75%	83%	91%	99,9%
Target 2024	4%	8%	13%	21%	29%	37%	49%	60%	72%	81%	90%	100%
Realisasi 2024	3%	9%	21%	27%	35%	40%						

Sumber: Sekretariat BPTJ, 2024

Tabel II. 15 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKP

Indikator Kinerja Program	Anggaran	Realisasi	%
IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	37.900.784.000	9.008.134.141	5,27%
IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	139.812.359.000	39.328.300.452	11,12%
IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	9.873.444.000	1.997.333.158	6,63%
IKP3 Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan	35.385.525.000	28.867.521.014	63,61%
IKP5 Indeks Reformasi Birokrasi BPTJ	107.201.899.000	53.116.010.121	27,17%

Sumber: Sekretariat BPTJ, 2024

4. Efisiensi Anggaran Triwulan II Tahun 2024

Penghitungan efisiensi anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Pengukuran efisiensi Output Program tingkat unit eselon I dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$EOP = \frac{\sum_{i=1}^{n}[(AA\ Program_i \times COP_i) - RA\ Program_i]}{\sum_{i=1}^{n} AA\ Program_i} \times 100\%$$

Keterangan:

EOP : Efisiensi Output Program
AA Program : Alokasi Anggaran
RA Program : Realisasi Anggaran
COP : Capaian Output Program
n : Jumlah Output Program

Perhitungan efisiensi dapat dilakukan dengan memanfaatkan data perbandingan antara alokasi anggaran, realisasi anggaran dan capaian output.

Pada Triwulan II Tahun 2024, BPTJ mencatatkan adanya efisiensi anggaran sebesar 47,48% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 16 Efisiensi Anggaran

IKP	Capaian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	AA x COP	(AA X COP) - RA	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)÷(3)
IKP1	108,79%	37.900.784.000	9.008.134.141	41.232.262.914	32.224.128.773	85,02%
IKP 2.1	100,61%	139.812.359.000	39.328.300.452	140.665.214.390	101.336.913.938	72,48%
IKP 2.2		9.873.444.000	1.997.333.158	0	-1.997.333.158	-20,23%
IKP3		35.385.525.000	28.867.521.014	0	-28.867.521.014	-81,58%
IKP5	100,00%	107.201.899.000	53.116.010.121	107.201.899.000	54.085.888.879	50,45%
Total		330.174.011.000	132.317.298.886	289.099.376.304	156.782.077.418	47,48%

Nilai efisiensi 47,48% dipengaruhi oleh nilai realisasi anggaran yang baru mencapai 40,08% pada Triwulan II Tahun 2024

BAB III
PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024, dapat disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dari pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang telah dihitung dimana tiga IKP telah mencapai target dan dua IKP yang masih dalam proses penghitungan.
2. Adapun rincian capaian masing-masing IKP pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:
    a. IKP1. Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek terealisasi sebesar 0,458 (target 0,42);
    b. IKP2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek terealisasi sebesar 93,97 (target 93,4);
    c. IKP2.2. On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek masih dalam proses penghitungan (target 82);
    d. IKP3. Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek masih dalam proses penghitungan (target 90);
    e. IKP5. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 56,25 (target 56,25)
3. Realisasi anggaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp.132.317.298.886 atau mencapai 40,08% dari pagu total Rp.330.174.011.000

B. Saran

Langkah yang perlu dilaksanakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan integrasi pada simpul transportasi di Jabodetabek
2. koordinasi dengan masing-masing unit pelayanan publik (satuan pelayanan terminal di lingkungan BPTJ dan perizinan angkutan orang di PTSA Gedung Cipta Kemenhub) untuk fokus mempertahankan kualitas pelayanan dan meningkatkan kinerja layanan yang nilainya masih bisa ditingkatkan
3. Meningkatkan kinerja reformasi birokrasi melalui:
   a. Melengkapi dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan serta dokumentasi kegiatan yang menunjang RB tematik
   b. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala
   c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang dituangkan pada rencana aksi reformasi birokrasi